



PERCEPATAN UPAYA PENGENDALIAN STUNTING DI JAWA BARAT

Disampaikan oleh:

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE., M.Eng.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

BANDUNG 01 JULI 2021

 **KONSEPTOR**

KONDISI STUNTING DI JAWA BARAT





FAKTOR PENYEBAB STUNTING

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami

oleh ibu hamil maupun anak balita.

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting diarahkan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Pengasuhan yang kurang baik

- kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan.
- 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif.

Kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.

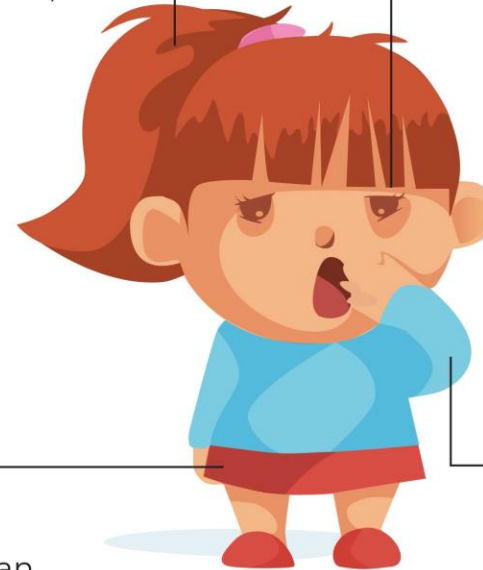
- Makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
- Komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS).

Terbatasnya Layanan Kesehatan

- Terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan dan pembelajaran dini yang berkualitas.

Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

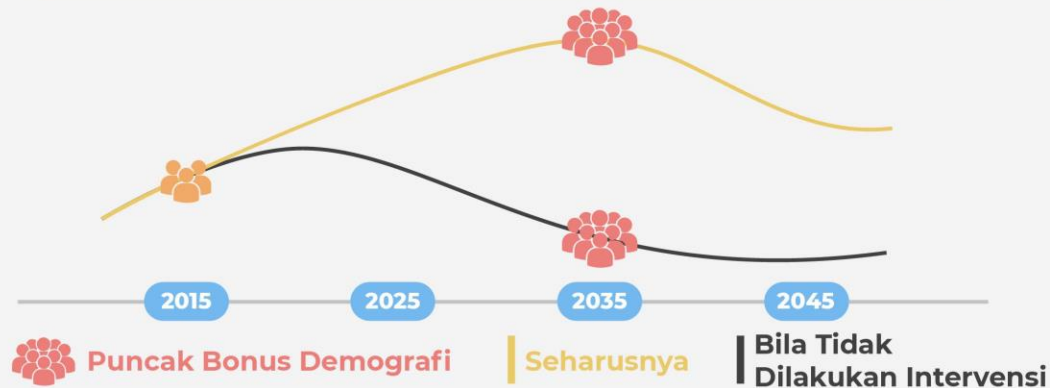
- 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka.
- 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.



DAMPAK STUNTING TERHADAP PEMBANGUNAN

Stunting Mengancam Masa Depan Indonesia

Bonus demografi atau Beban Negara?



Indonesia diproyeksikan mengalami puncak pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2035. Namun, bonus demografi ini tidak akan berguna atau bahkan akan menjadi **beban negara** jika tingginya prevalensi balita *stunting* tidak diperbaiki saat ini.



Kerugian ekonomi negara

Stunting menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data world bank, PDB negara kita Rp. 13.000 triliun (2017), maka kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar:

260-390 TRILIUN

PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN SAAT PANDEMI COVID-19

Angka Stunting Diperkirakan Bertambah Setelah Pandemi Covid-19

Hilmi Abdul Halim - 30 Juni 2020, 19:41 WIB



PikiranRakyat

PIKIRAN RAKYAT - SOSIALISASI pencegahan masalah gizi buruk (*stunting*) terganggu selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*). Hal itu dikhawatirkan ikut menambah jumlah penderita *stunting* di Jawa Barat meskipun tidak signifikan.

Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan dalam kegiatan pos pelayanan terpadu (*posyandu*). "Karena *Covid-19* ini kegiatan di *posyandu* ikut terganggu karena perlu menghindari kerumunan," kata Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jawa Barat, Suparman, Selasa 30 Juni 2020.

Layanan imunisasi 83,9% terganggu karena pandemi Covid-19

Senin, 08 Juni 2020 | 20:08 WIB | Reporter: Rethi Waseso



tribunnews.com/indonesia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Vensya Sitohang mengungkapkan, dari hasil survei pihaknya bersama UNICEF dan pemerhati imunisasi anak didapatkan fakta 83,9% pelayanan kesehatan terdampak akan adanya wabah virus corona (*Covid-19*).

WHO: Pandemi COVID-19 Ganggu Layanan Kesehatan Bagi Pasien PTM



Kepala WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (AFP)

Liputan6.com, Jakarta World Health Organization (WHO) mengatakan pandemi *COVID-19* membuat terganggunya pelayanan kesehatan bagi mereka yang memiliki masalah penyakit tidak menular (PTM).

Temuan tersebut dinyatakan usai dilakukannya survei yang dilakukan di 155 negara selama tiga pekan di bulan Mei. WHO mengatakan meski dampaknya bersifat global, namun negara-negara berpenghasilan rendah menjadi yang paling terpengaruh.

Menko PMK: Angka Stunting di Indonesia Diperkirakan Naik Akibat Covid-19

Lize Egehem
25 Jan 2021, 14:11 WIB



Ilu hamil berkonsultasi dengan dokter di Puskesmas Kecamatan Jati negara, Jember, Kamis (20/1/2021). Penurunan rutin kehamilan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kandungan merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah *stunting*. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut angka *stunting* di Indonesia masih relatif tinggi, yakni 27,6 persen pada 2019. Angka *stunting* pada 2020 diprediksi naik akibat pandemi *Covid-19*.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa angka *stunting* kita masih relatif tinggi yaitu 27,6 persen tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan akibat dari wabah *Covid-19*," jelas Muhadjir dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (25/1/2021).



PANDEMI COVID-19 BERPOTENSI MENINGKATKAN ANGKA STUNTING

Hasil survei Balitbangkes Kemenkes pada **4.798** puskesmas, diketahui terdapat penurunan pada kegiatan posyandu dan penurunan kunjungan ke puskesmas.

MEREKA YANG TIDAK MELAKUKAN
KUNJUNGAN KE PUSKESMAS

30,58%

IBU HAMIL

31,01%

BALITA STUNTING/GIZI BURUK

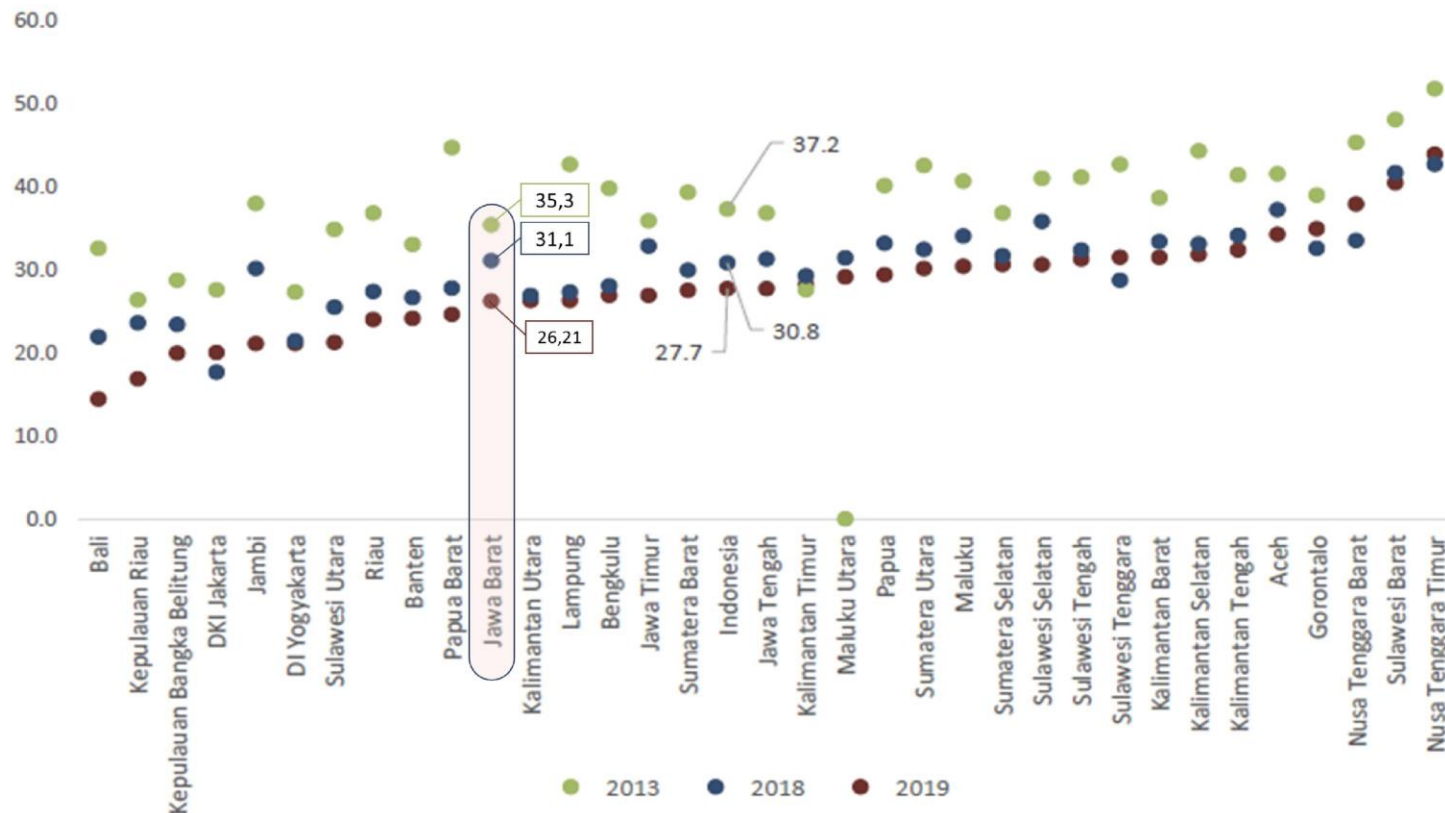
43,51%
MENGHENTIKAN KEGIATAN

37,23%
PENURUNAN KEGIATAN

18,7%
KEGIATAN NORMAL



PERKEMBANGAN PREVALENSI STUNTINGMPROVINSI SECARA NASIONAL 2013-2019

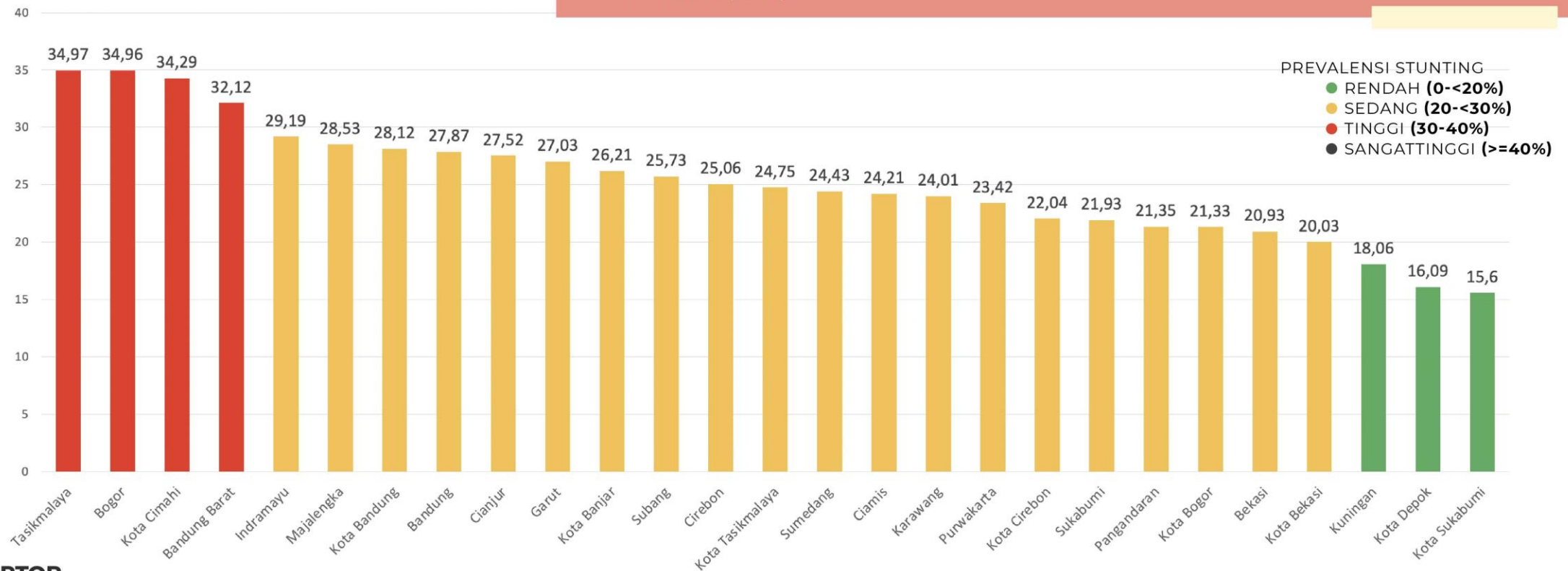


Jawa Barat :

- 1 Penurunan Prevalensi Stunting periode 2013-2019 : **9.1%**
- 2 rata-rata penurunan **1.51%** per tahun.
- 3 Pada tahun 2019, prevalensi stunting Jawa Barat tahun 2019 berada di peringkat ke 11, lebih baik dibanding rata-rata nasional.

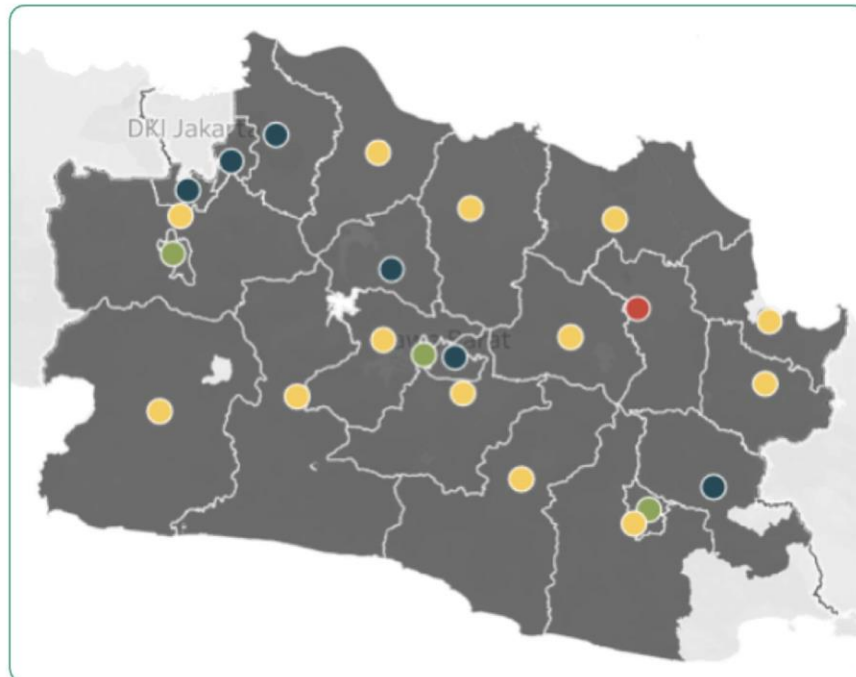
PROPORSI STUNTING PADA BALITA MENURUT KAB/KOTA JAWA BARAT (SSGBI 2019)

- WHO menetapkan batas maksimal adalah 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita
- Hanya 3 Wilayah di Jawa Barat yang berada pada Zona Hijau (<20%)
- Untuk mencapai target Nasional 14% diperlukan upaya akselerasi tidak hanya Business As Usual (BAU).



LOKUS PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT

Peta Lokus Stunting Jawa Barat



■ Tahun Prioritas 2018
■ Tahun Prioritas 2020

■ Tahun Prioritas 2019
■ Tahun Prioritas 2021

Penetapan Lokus Stunting Jawa Barat

2018	2019	2020	2021	2022
13 Kabupaten	14 Kabupaten	20 Kab/Kota	23 Kab/Kota	27 kab/kota



Pada Tahun 2022
Seluruh Kab/Kota
Provinsi Jawa Barat
telah ditetapkan
menjadi Lokus
Prioritas penurunan
stunting

Kriteria Pemilihan Lokasi Fokus oleh Pemerintah Pusat:

1. Jumlah balita *stunting*
2. Prevalensi *stunting*
3. Tingkat kemiskinan
4. Daerah dengan komitmen & praktik baik
5. Pemerataan lokus di tiap Provinsi

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

10 PROVINSI DENGAN INDEKS KHUSUS PENANGANAN STUNTING DI ATAS NASIONAL

Dimensi dan Indikator Penilaian

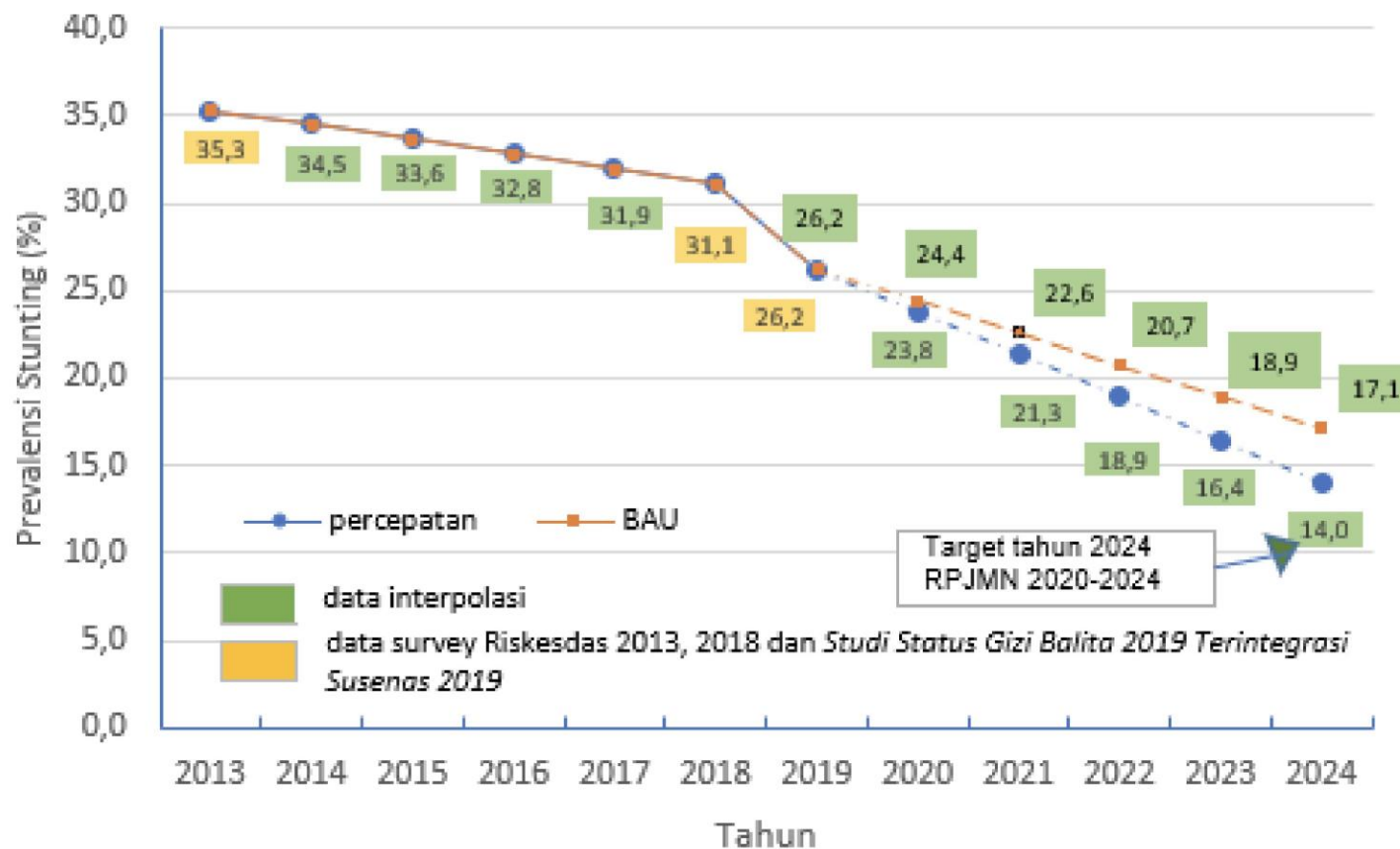
No.	Dimensi	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Kesehatan	Imunisasi
		Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
		Keluarga Berencana (KB) Modern
2	Gizi	ASI Eksklusif
		Makanan Pendamping (MP) ASI
3	Perumahan	Air Minum Layak
		Sanitasi Layak
4	Pangan	Mengalami Kerawanan Pangan
		Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
5	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6	Perlindungan Sosial	Pemanfaatan Jaminan Kesehatan
		Penerima KPS/KKS

DI Yogyakarta	79,94
Nusa Tenggara Barat	72,97
Jawa Tengah	71,17
Jawa Timur	70,69
DKI Jakarta	70,56
Bali	69,71
Gorontalo	69,48
Kalimantan Selatan	66,77
Jawa Barat	66,22
Sulawesi Selatan	66,20
Indonesia	66,08



PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI JAWA BARAT

Pevalensi Balita Stunting Jabar : Realisasi & Target



Realisasi

Laju penurunan stunting 2013-2019

35,5% ← **Rate : 1,82%/tahun** → **35,5%**
Th 2013

Target

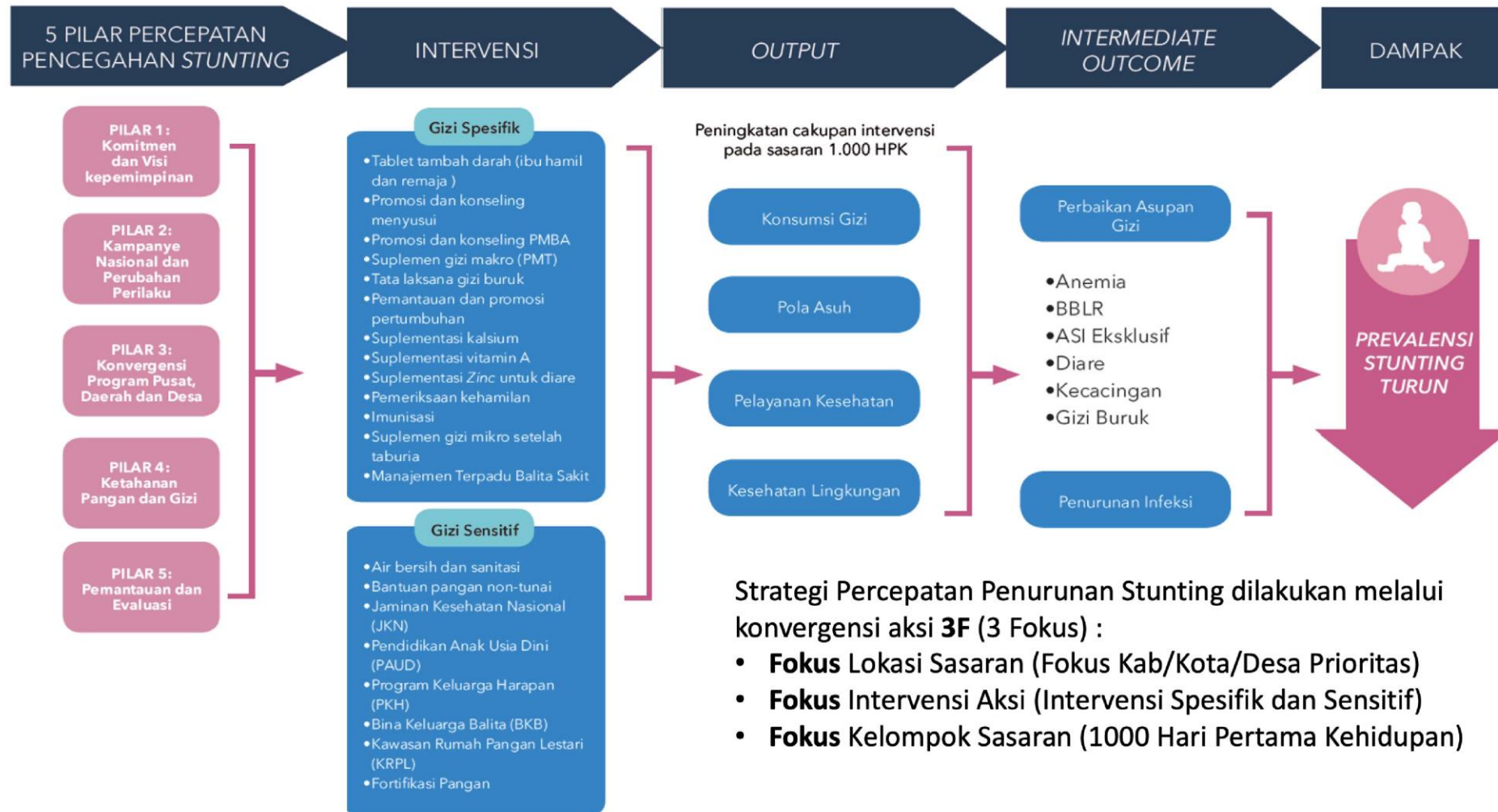
Laju penurunan stunting 2019-2024

26,2% ← **Rate : 2,4%/tahun** → **14,0%**
Th 2019

Output aksi-aksi penurunan stunting periode 2019-2024 memerlukan effort 2 kali lipat daripada periode 2013-2019.

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

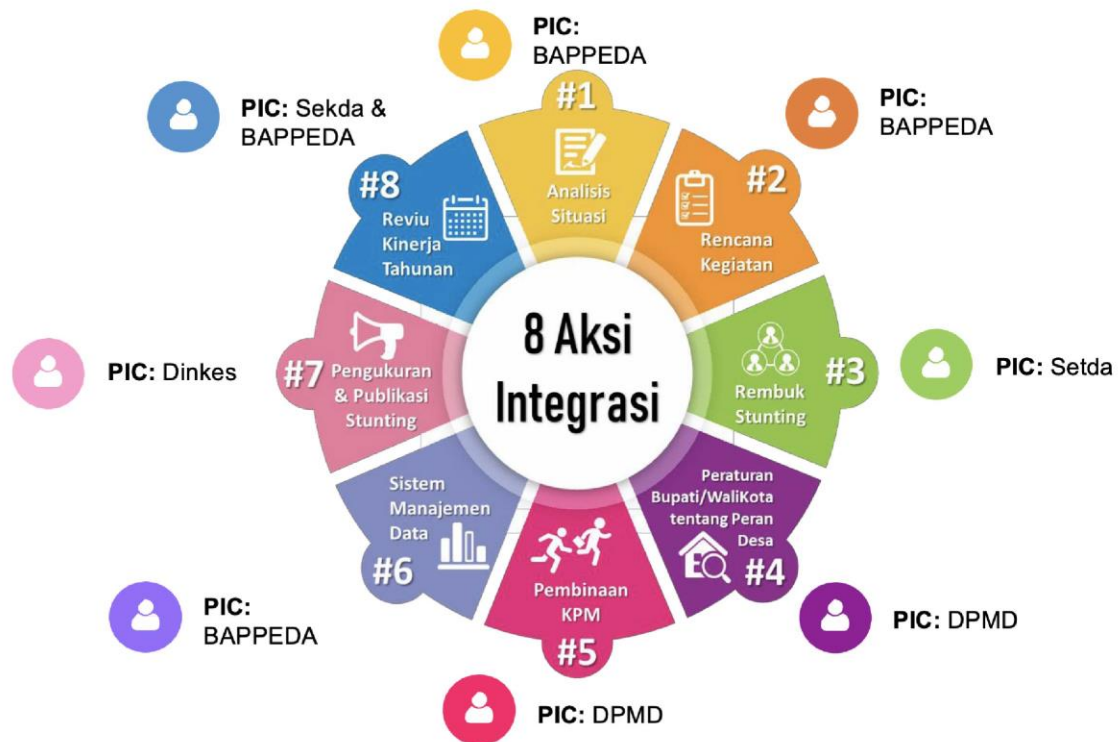
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 2018-2024



KONVERGENSI DAN INTEGRASI DI DAERAH

8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota

“Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi dalam penurunan *stunting*”



Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*

“Konvergensi adalah upaya untuk memastikan seluruh intervensi penurunan *stunting* sampai pada target sasaran.”



UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.

1. Pendekatan Multi-sektor

“tidak terbatas pada sektor kesehatan”



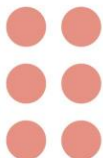
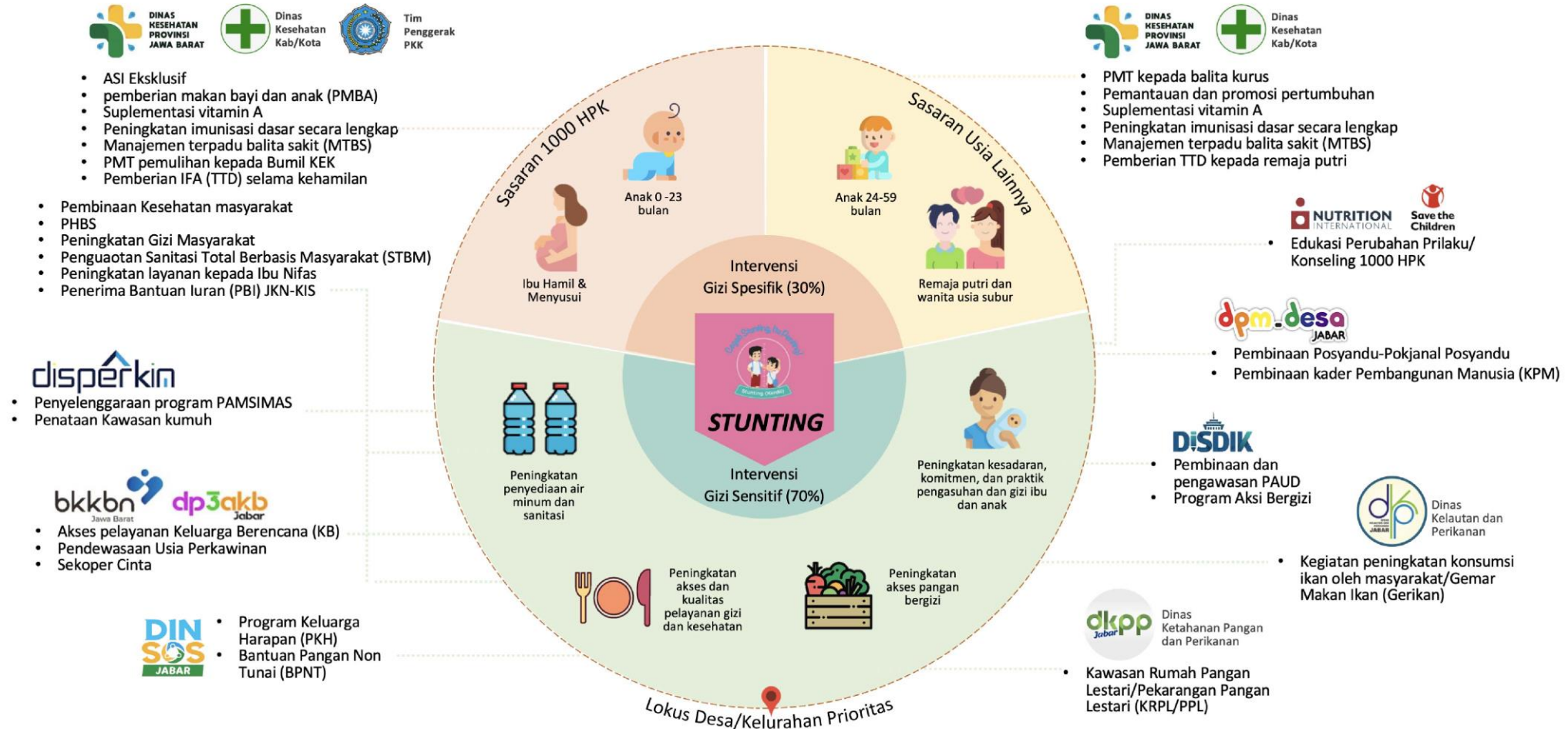
2. Pelibatan Multi-stakeholder

“Penurunan Stunting memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan”





CROSS-CUTTING PROGRAM/KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI



KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN SERTA PERAN STAKEHOLDER DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN SERTA PERLIBATAN PRIVATE & FILANTROPI

Deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting di Bandung Didukung Danone Indonesia

Minggu, 18 November 2018 22:07 WIB



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat saat memberikan penghargaan kepada Vera Galuh Sugianto VP General Secretary Danone Indonesia. Piagam penghargaan ini sebagai bentuk dukungan Danone Indonesia dalam aksi deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, **Ridwan Kamil** pada kesempatan ini juga meresmikan pencanangan program Zero Stunting Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Jawa Barat, Kepala **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**, beberapa mitra dari sektor swasta, dan juga 5,000 kader posyandu, pengurus PKK, pendidik PAUD, mahasiswa hingga tokoh publik menargetkan dalam 5 (lima) tahun kedepan Jabar akan bebas dari stunting.

Komitmen Menuju Jabar Zero New Stunting

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PT. TIRTA INVESTAMA,
PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA,
PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA,
DAN
PT. NUTRICIA MEDICAL NUTRITION
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA BARAT MELALUI PENCEGAHAN STUNTING DAN MALNUTRISI

NOMOR : 119/79/Dinkes

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (12-11-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CORINE DANIELLE TAP : Presiden Direktur PT Tirta Investama, berkedudukan di Jakarta, Cyber 2 Tower Nomor 13 Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, berdasarkan Akta Pendirian PT Tirta Investama Nomor 142 tanggal 16 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-10.060.HT.01.01.TH.94 tanggal 1 Juli 1994, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tirta Investama.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 5 (lima) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. TIRTA INVESTAMA

CORINE DANIELLE TAP

PIHAK KESATU,
GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PT. SARIHUSADA GENERASI
MAHARDHIKA

CONNIE ANG

PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA

JULIE WENDY JONES

PT. NUTRICIA MEDICAL NUTRITION

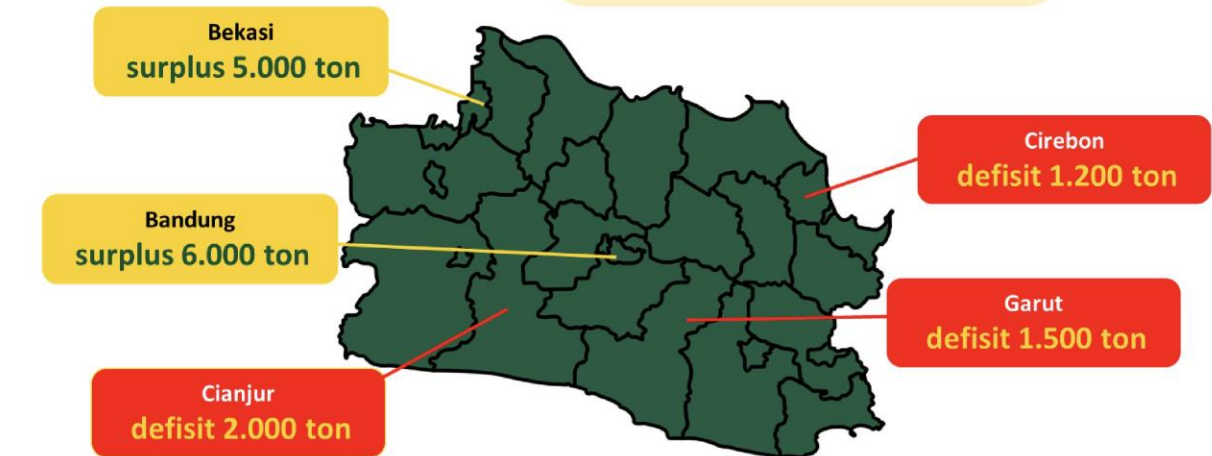
ANTONIUS BOBBY HENDARTO

KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN SERTA PERLIBATAN PRIVATE & FILANTROPI

Rencana Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Baznas Jawa Barat dalam pemanfaatan Qurban untuk penurunan stunting



Fakta Pendistribusian Qurban di Jawa Barat



*Sumber: Riset IDEAS 2020

Pemprov bekerjasama dengan Baznas Jawa Barat dalam pelaksanaan program Qurban untuk Jabar, dan kedepan akan melaunching Program Sedekah Daging yang diharapkan dapat menjadi salah satu program unggulan penurunan stunting di Jawa Barat.



KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN SERTA PERLIBATAN PRIVATE & FILANTROPI

BETTER INVESTMENT FOR STUNTING ALLEVIATION (BISA)

Working together to improve nutrition in Indonesia

The Better Investment for Stunting Alleviation project supports the Government of Indonesia's national strategy to reduce stunting by improving nutrition before pregnancy and in the critical first 1,000 days.



4.8K
CHILDREN'S LIVES
SAVED



3.3M
WOMEN, CHILDREN
UNDER TWO, AND
ADOLESCENT GIRLS
REACHED



161K
CASE-YEARS OF ANAEMIA
AVERTED

BISA berupaya mendorong perubahan perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan pendampingan tentang gizi dan higienitas dengan peningkatan pengetahuan, mengubah perilaku, meningkatkan akses dan kualitas ayanan, advokasi dalam mengelola sumberdaya dan menerapkan kebijakan secara lebih efisien dan efektif di Provinsi Jawa Barat.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK,
DAN
NUTRITION INTERNATIONAL
TENTANG
PROGRAM BISA (BETTER INVESTMENT FOR STUNTING ALLEVIATION)

NOMOR : 167/KS.17.02.05/Yanbangsos
051.AGR.YSTC.XI.2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh (25-11-2020), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SETIAWAN WANGSAATMAJA : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 113/DG.02.02.01/Pemksm tanggal 20 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PRIMA SETIAWAN : Chief of Party Program Better Investment For Stunting Alleviation Yayasan Sayangi Tunas Cilik, berkedudukan di Jakarta, Jalan Bangka IX Nomor 40 A & B Mampang Prapatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 016.POA.YSTC.V.2020 tanggal 7 Oktober 2020, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M. Kn, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-01712.50. 01.2014 Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sayangi Tunas Cilik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
PRIMA SETIAWAN SETIAWAN WANGSAATMAJA



STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING JAWA BARAT: PENGUATAN KOMITMEN



GOVERNOR JAWA BARAT

Bandung, 9 Maret 2021

Nomor : 1137/PR.01/BAPP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kepada
Yth. Bupati dan Wali Kota
se-Jawa Barat
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 167 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat BAB VI Pengawasan dan Pelaporan ; Pasal 8 ; menyatakan bahwa pengawasan dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Tim Percepatan Penurunan Stunting secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ; dinyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur secara berkala dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan evaluasi Pelaksanaan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, agar Para Bupati/Wali Kota dapat menyampaikan laporan dimaksud, paling kurang meliputi :

- Pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - Pelaksanaan intervensi prioritas gizi spesifik dan sensitif; dan
 - Capaian kinerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- Laporan tersebut dimohon dapat disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat paling lambat Tanggal 31 Maret 2021, melalui E-mail: jabar.zerostunting@gmail.com, alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No 287, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Contact Person: Ika Khuliani, SKM, MKM (0811 2234 566).

Demikian dapat disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GOVERNOR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota terkait Pelaporan Stunting di Jawa Barat



GOVERNOR JAWA BARAT

Bandung, 20 April 2021

Nomor : 2154/PR.01/BAPP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penetapan Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi

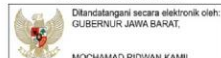
Kepada
Yth. Bupati/Walikota
se-Jawa Barat
di
Tempat

Dalam rangka pengawalan program "Jabar Zero New Stunting" melalui upaya terpadu penurunan stunting, diperlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti hal tersebut, agar Bupati/Walikota Se-Jawa Barat dapat segera menetapkan Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 dan Tahun 2022. Dalam menentukan desa/kelurahan lokasi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengacu pada hasil Analisis Situasi yang merupakan Aksi 1 dalam 8 Aksi Konvergensi Intervensi Pencegahan Stunting. Lokasi Prioritas tersebut juga diharapkan dapat menjadi lokasi program terintegrasi baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GOVERNOR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota terkait Penetapan Lokasi Prioritas Stunting di Jawa Barat



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232444, 4233347, 4230963
Faksimil : (022) 4230450 Website : www.jabarprov.go.id Email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 09 Maret 2021

Nomor : 1138/PR.01/BAPP
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penguatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

Dalam rangka pengawalan program "Jabar Zero New Stunting" melalui upaya terpadu penurunan stunting, diperlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas dengan penambahan 4 Kabupaten/Kota (terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut, agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dapat terus melaksanakan upaya penguatan intervensi penurunan stunting terintegrasi dan optimalisasi peran Tim Koordinasi di daerahnya dengan perluasan pelibatan para pihak di daerah masing-masing, baik melalui penajaman perencanaan kegiatan yang lebih terukur pada Perangkat Daerah maupun kemitraan peran dengan stakeholder lainnya (pendekatan kolaborasi Pentahelix).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Selaku :
PENGARAH TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN STUNTING
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Sekretaris Daerah ditujukan kepada Sekda Kab./Kota terkait Penguatan Intervensi Penurunan Stunting



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. (022) 2516048 Fax : (022) 2516731
Website : <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> E-mail : bappeda@jabarprov.go.id, info@jabar@gmail.com
BANDUNG - 40135

Bandung, 12 Maret 2021

Nomor : 1516/KS.03.03.06/PPM
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2020

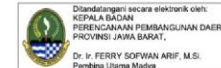
Kepada
Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 441.05/Kep.1076-Yanbangs/2019 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu, Kematian Bayi, dan Stunting yang amanatkan Tim Koordinasi untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Berikut kami sampaikan surat permohonan laporan kepada Koordinator Pokja Tim Koordinasi tentang Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2020.

Berkeinginan dengan hal tersebut, mohon kiranya kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOPHAN ARIF, M.Si, Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat ditujukan kepada Ketua Pokja terkait Pelaporan Stunting



PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI JAWA BARAT

Upaya pencegahan dan penurunan Stunting di Jawa Barat dilaksanakan melalui pendekatan 5K+



Konsep Penanggulangan yang Baik,

Kolaborasi seluruh Stakeholder Pembangunan

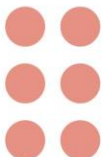
Komitmen yang Kuat

Konsisten dalam berbagai Program dan aktivitas

Kontinyu (Berkelanjutan) dalam melakukan monitoring dan Evaluasi

+1 K

Kamana Wae Atuuuuuhhhh..hayu urang sasarengan ngawujudkeun Jabar Zero New Stunting.



Jual Lanting, Beli Anting.. Cegah Stunting, itu Penting!!!



TERIMA KASIH

Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Telepon/Fax 022 4231 161



KONSEPTOR